

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Laporan Kinerja

Tahun 2019



Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

LKJ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur kami panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Dengan demikian, Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dengan mengacu kepada pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Kerja di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban pula menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 kepada Gubernur sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dijalankan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019 secara transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik dan saran atas isi laporan ini demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini, kami atas nama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Amin.

Pontianak, Februari 2020
Kepala Biro Perekonomian,

Dr. HERKULANA MEKARRYANI. S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	
1. Pendahuluan	1
2. Struktur Organisasi	3
3. Tupoksi	6
4. Sumber Daya Aparatur	22
5. Sumber Daya Keuangan	24
6. Sarana dan Prasarana	29
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	
1. Visi	40
2. Misi	41
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	41
B. PERJANJIAN KINERJA	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	51
B. REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV PENUTUP	
Penutup	57



OBAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 5 angka 1 dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Biro Pengelolaan Aset.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
4. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III);
5. Biro Pemerintahan;
6. Biro Hukum;
7. Biro Kesejahteraan Rakyat;
8. Biro Perekonomian;
9. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Biro Organisasi;
11. Biro Umum;
12. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Adapun Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat secara struktural berada dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pasal 110 Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) angka 2 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sedangkan pada pasal 111 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana



- perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro) dan terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III (Kepala Bagian) dan terdapat 9 (sembilan) Sub Bagian yang masing masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Sub Bagian). Adapun Struktur Organisasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

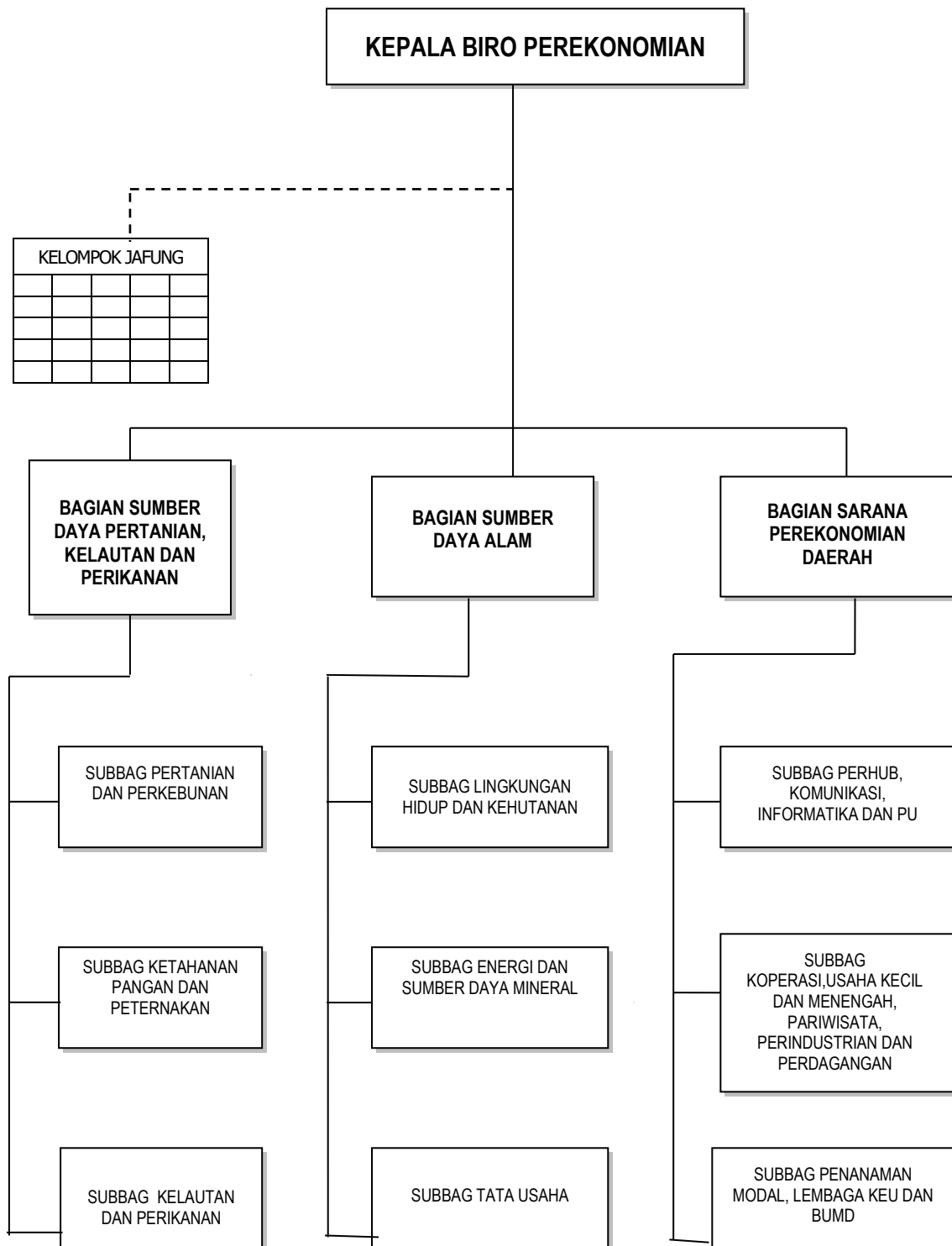
- a. Kepala Biro,
- b. Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, membawahi;



- 1) Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan;
 - 2) Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - 3) Sub Bagian Kelautan dan Perikanan;
- c. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi;
- 1) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Bagian Sarana Perekonomian Daerah, membawahi;
- 1) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pekerjaan Umum;
 - 2) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bagian Penanaman modal, Lembaga Keuangan dan BUMD.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**





3. Tupoksi

a. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Tugas Pokok Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam pasal 110 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ***Merumuskan kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah.***

b. Fungsi

Mengacu kepada pasal 111 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

Adapun **Tugas Pokok** dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian.
2. Bagian Sumber Daya Pertanian, Kaluatan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi dibidang pertanian dan perkebunan, ketahanan pangan dan peternakan serta Kelautan dan Perikanan.



3. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan Sumber Daya Mineral serta pelaksanaan ketatausahaan Biro.
4. Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal, kelembagaan keuangan dan BUMD.
5. Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan dan peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Kelautan dan Perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Sub Bagian Energi dan Sumber daya Mineral mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah



daerah dibidang energi dan sumber daya mineral serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
12. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan **Fungsi** dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian
 - a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
 - b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana



- perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengkoordinasi an dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah dibidang perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengendalian kegiatan dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan
 - a. Penyusunan Program kerja di Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Sumber daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang Sumber Daya Perikanan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Sumber daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Pertanian,



Kelautan dan Perikanan seduai dengan ketentuan perundang-undangan;

- k. Pelaksanaan tugas lai dibidang Sumber Daya Pertanian, kelautan dan Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Bagian Sumber Daya Alam

- a. Penyusunan program kerja di bagian Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi bidang sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang Sumber Daya Alam pada Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. Pelaksanaan tugas lain dibidang Sumber daya Alam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagian Sarana Perekonomian Daerah
- a. Penyusunan program kerja di bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain dibidang sarana perekonomian daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan
- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pertanian;
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian dan perkebunan yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketahanan pangan dan peternakan yang diserahkan oleh kepala bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan

- a. Penyusunan rencana kegiatan di sub bagian Kelautan dan Perikanan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang kelautan dan perikanan;



- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Lingkungan



- Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang energi dan sumber



daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang energi dan sumber daya mineral yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sub Bagian Tata Usaha Biro

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Biro;
- e. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga tata usaha Biro;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang tata usaha Biro;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;



- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha Biro yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum
- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Perhubungan, komunikasi, informatika dan Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perhubungan, komunikasi, informatiak dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di provinsi dibidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perhubungan, komunikasi,,informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain dibidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan



Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub bagian Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang



Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Penanaman Modal, lembaga Keuangan dan BUMD Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh Kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini per 31 Desember 2019 didukung oleh 30 (tiga puluh) orang pegawai, 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan IPDN (dalam tahap magang CPNS) serta 3 (tiga) orang Pegawai Tidak Tetap/Kontrak. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

**Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tugas Pokok/Bagian	Kualifikasi Pendidikan							JML
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Kepala)	-	-	-	-	1	-	-	1
	▪ Subbag Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	3	-	-	3
	▪ Subbag Ketahanan Pangan dan Peternakan	-	-	-	-	1	-	-	1
	▪ Subbag Kelautan dan Perikanan	1	-	-	-	-	1	-	2



3	Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)	-	-	-	-	-	1	-	1
	▪ Subbag Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	1	2	-	3
	▪ Subbag Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1	2	-	-	3
	▪ Subbag Tata Usaha Biro	3	-	-	1	2	-	-	6
4	Bagian Sarana Perekonomian Daerah (Kepala)	-	-	-	-	1	-	-	1
	▪ Subbag PerhubKomInfo dan PU	1	-	-	-	-	1	-	2
	▪ Subbag Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	2	-	-	2
	▪ Subbag Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD	1	-	-	1	2	-	-	4
Total		6	0	0	3	15	5	1	30

Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Pangkat/Golongan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No	Tugas Pokok/Bagian	Pangkat Golongan				JML
		IV	III	II	I	
1	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2	Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ SubBag Pertanian dan Perkebunan	-	3	-	-	3
	▪ Subbag Ketahanan Pangan dan Peternakan	1	-	-	-	1
	▪ Subbag Kelautan dan Perikanan	-	2	-	-	2
3	Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ Subbag Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	2	-	-	3
	▪ Subbag Energi dan Sumber Daya Mineral	-	3	-	-	3
	▪ Subbag Tata Usaha Biro	-	5	1	-	6
4	Bagian Sarana Perekonomian Daerah (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ Subbag PerhubKomInfo dan PU	-	2	-	-	2
	▪ Subbag Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	-	2	-	-	2
	▪ Subbag Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD	-	4	-	-	4
Total		6	23	1	-	30



**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan/Pelatihan Jabatan
Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tugas Pokok/Bagian	Pendidikan dan Pelatihan					JML
		PIM II	PIM III	PIM IV	Fungsional	Non Diklat	
1	Eselon II	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	-	2	1	-	-	3
3	Eselon IV	-	-	9	-	-	9
4	Fungsional Umum	-	-	-	-	17	17
5	Fungsional Khusus	-	-	-	-	-	-
Total		1	2	10	-	17	30

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2019 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) dengan Nomor: 903/030/DPA-SKPD/BKPD-B TA. 2019 Tanggal 2 Januari 2019 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2.560.863.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Adapun rincian terhadap penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	3.00.3.00.00.06.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milih daerah	Rp. 9.000.000
2.	3.00.3.00.00.06.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 4.575.000
3.	3.00.3.00.00.06.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Rp. 4.800.000
4.	3.00.3.00.00.06.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 15.000.000
5.	3.00.3.00.00.06.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 15.000.000
6.	3.00.3.00.00.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp. 366.816.800
7.	3.00.3.00.00.06.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Rp 30.000.000



8.	3.00.3.00.00.06.02.20	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan jabatan 74 kendaraan dinas/ operasional	Rp. 38.960.000
9.	3.00.3.00.00.06.02.21	Pemeliharaan rutin / berkala AC/ Kipas Angin	Rp. 6.778.000
10.	3.00.3.00.00.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Rp 6.600.000
11.	3.00.3.00.00.06.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Rp. 4.990.200
12.	3.00.3.00.00.06.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Rp. 20.000.000
13.	3.00.3.00.00.06.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Rp. 35.000.000
14.	3.00.3.00.00.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Rp. 25.000.000
15.	3.00.3.00.00.06.06.03	Penyusunan RENSTRA	Rp. 30.000.000
16.	3.00.3.00.00.06.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Rp. 30.000.000
17.	3.00.3.00.00.06.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Rp. 30.000.000
18.	3.00.3.00.00.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Rp. 30.000.000
19.	3.00.3.00.00.06.07.01	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Rp. 15.000.000
20.	3.00.3.00.00.06.15.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan	Rp. 172.770.000
21.	3.00.3.00.00.06.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 74.120.000
22.	3.00.3.00.00.06.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 60.000.000
23.	3.00.3.00.00.06.15.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Rp. 105.650.000
24.	3.00.3.00.00.06.15.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Rp. 60.185.000
25.	3.00.3.00.00.06.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Barat	Rp. 40.350.000
26.	3.00.3.00.00.06.15.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000



27.	3.00.3.00.00.06.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Rp. 105.000.000
28.	3.00.3.00.00.06.15.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Rp. 80.000.000
29.	3.00.3.00.00.06.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Rp. 125.590.000
30.	3.00.3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Rp. 138.190.000
31.	3.00.3.00.00.06.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 58.020.000
32.	3.00.3.00.00.06.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Rp. 49.000.000
33.	3.00.3.00.00.06.16.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 58.000.000
34.	3.00.3.00.00.06.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 90.000.000
35.	3.00.3.00.00.06.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	Rp. 63.757.000
36.	3.00.3.00.00.06.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	Rp. 93.034.000
37.	3.00.3.00.00.06.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp. 130.857.000
38.	3.00.3.00.00.06.16.08	Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Dan Penanaman Modal	Rp. 69.120.000
39.	3.00.3.00.00.06.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD Di Kalimantan Barat	Rp. 79.800.000
40.	3.00.3.00.00.06.16.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Rp. 89.900.000
Jumlah			Rp.2.560.330.000

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 903/2509/BPKPD-B Tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2019 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi



dana sebesar Rp. 1.822.330.950,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Adapun rincian terhadap penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	3.00.3.00.00.06.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milih daerah	Rp. 9.000.000
2.	3.00.3.00.00.06.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 4.575.000
3.	3.00.3.00.00.06.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Rp. 4.800.000
4.	3.00.3.00.00.06.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 17.000.000
5.	3.00.3.00.00.06.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 15.000.000
6.	3.00.3.00.00.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp. 235.696.250
7.	3.00.3.00.00.06.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Rp. 30.000.000
8.	3.00.3.00.00.06.02.21	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan jabatan kendaraan dinas/ operasional	Rp. 38.960.000
9.	3.00.3.00.00.06.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala AC/ Kipas Angin	Rp. 7.778.000
10.	3.00.3.00.00.06.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/ peralatan kantor	Rp. 6.600.000
11.	3.00.3.00.00.06.05.06	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Rp. 4.990.200
12.	3.00.3.00.00.06.06.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Rp. 20.000.000
13.	3.00.3.00.00.06.06.02	Penyusunan laporan keuangan	Rp. 35.000.000
14.	3.00.3.00.00.06.06.03	Penyusunan LAKIP	Rp. 25.000.000
15.	3.00.3.00.00.06.06.04	Penyusunan RENSTRA	Rp. 30.000.000
16.	3.00.3.00.00.06.06.05	Penyusunan RENJA SKPD	Rp. 30.000.000
17.	3.00.3.00.00.06.06.07	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Rp. 30.000.000
18.	3.00.3.00.00.06.07.01	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Rp. 30.000.000
19.	3.00.3.00.00.06.15.01	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Rp. 15.000.000



20.	3.00.3.00.00.06.15.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan	Rp. 123.407.500
21.	3.00.3.00.00.06.15.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 44.073.000
22.	3.00.3.00.00.06.15.05	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 35.820.000
23.	3.00.3.00.00.06.15.07	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Rp. 70.453.200
24.	3.00.3.00.00.06.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Rp. 46.871.450
25.	3.00.3.00.00.06.15.09	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Barat	Rp. 27.683.000
26.	3.00.3.00.00.06.15.10	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 69.695.000
27.	3.00.3.00.00.06.15.11	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Rp. 76.550.000
28.	3.00.3.00.00.06.15.12	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Rp. 58.380.000
29.	3.00.3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Rp. 96.267.000
30.	3.00.3.00.00.06.16.01	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Rp. 107.079.550
31.	3.00.3.00.00.06.16.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 19.890.000
32.	3.00.3.00.00.06.16.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Rp. 29.230.000
33.	3.00.3.00.00.06.16.09	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 35.300.000
34.	3.00.3.00.00.06.16.10	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 59.981.800
35.	3.00.3.00.00.06.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	Rp. 36.833.000
36.	3.00.3.00.00.06.01.04	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	Rp. 54.094.000



37.	3.00.3.00.00.06.01.05	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp. 84.425.000
38.	3.00.3.00.00.06.01.08	Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Dan Penanaman Modal	Rp. 42.180.000
39.	3.00.3.00.00.06.01.13	Koordinasi Pengembangan BUMD Di Kalimantan Barat	Rp. 58.060.000
40.	3.00.3.00.00.06.01.14	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Rp. 66.460.000
Jumlah			Rp.1.822.330.950

6. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari Inventaris Kantor dan Barang Habis Pakai.

a. Inventaris Kantor

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat terbentuk dengan adanya pemekaran dari Biro Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya, sehingga menjadi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar dan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalbar.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai data inventarisasi di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, sebagian besar masih menggunakan fasilitas yang sebelumnya dipergunakan oleh Aset BPKAD, Aset Biro Humas dan Aset Biro Umum dan hasil rekonsiliasi Aset dengan Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan penegasan penempatan lokasi untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Adapun rincian barang inventaris di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan



dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
adalah sebagai berikut :

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Nomor: 028/01/PA-C
Tanggal 19 Juni 2017**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA
1.	0206010102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0001	Olympia		Besi	2008	2.131.250,00
2.	0206010102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0002	Olympia		Besi	2008	2.131.250,00
3.	0206020301	Mesin Penghisap Debu	0001	-	Drum 5-10 liter	Plastik	2010	1.475.000,00
4.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0001	Super Power		Besi	2000	1.000.000,00
5.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0001	-		Besi	2009	1.980.000,00
6.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0002	-		Besi	2009	1.980.000,00
7.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0003	-		Besi	2009	1.980.000,00
8.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0002	ICA	700 watt	Besi	2012	902.205,00
9.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0004	ICA		Besi	2014	1.289.590,00
10.	0206020618	Unit Power Supply (UPS)	0005	ICA		Besi	2014	1.289.590,00
11.	0206030201	PC Unit	0001	HP AIO 20-r0221		Plastik	2016	8.501.794,00
12.	0206030201	PC Unit	0001	NOC		Plastik	2014	7.577.056,00
13.	0206030201	PC Unit	0002	ACER		Plastik	2014	



14.	0206030501	CPU	0001	ACER		Alumunium	2004	7.577.056,00
15.	0206030501	CPU	0002	ACER		Alumunium	2004	6.500.000,00
16.	0206030501	CPU	0003	ASUS		Alumunium	2004	6.500.000,00
17.	0206030501	CPU	0004	ASUS	-	Alumunium	2004	6.500.000,00
18.	0206030501	CPU	0005	CASE	-	Alumunium	2004	6.500.000,00
19.	0206030501	CPU	0001	POWER CHIP	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
20.	0206030501	CPU	0001	SAMSUNG	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
21.	0206030501	CPU	0002	SAMSUNG	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
22.	0206030501	CPU	0003	LG	-	Alumunium	2001	7.100.000,00
23.	0206030501	CPU	0001	AC CASE	-	Alumunium	2002	7.100.000,00
24.	0206030502	Monitor	0001	LG	-	Alumunium	2004	1.875.000,00
25.	0206030502	Monitor	0002	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
26.	0206030502	Monitor	0003	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
27.	0206030502	Monitor	0004	LG	-	Plastik	2004	1.875.000,00
28.	0206030502	Monitor	0005	LG/ACER	-	Plastik	2004	1.875.000,00
29.	0206030502	Monitor	0006	LG/ACER	-	Plastik	2004	1.875.000,00
30.	0206030502	Monitor	0007	LG/VIEW SONIC	-	Plastik	2004	1.875.000,00
31.	0206030502	Monitor	0008	LG/VIEW SONIC	-	Plastik	2004	1.875.000,00
32.	0206030502	Monitor	0001	SAMSUNG	-	Plastik	2004	1.875.000,00



33.	0206030502	Monitor	0001	VIEW SONIC	-	Plastik	2000	2.000.000,00
34.	0206030503	Printer	0001	CANON	-	Plastik	2003	1.000.000,00
35.	0206030503	Printer	0001	CANON	-	Plastik	2004	1.750.000,00
36.	0206030503	Printer	0002	CANON		Plastik	2003	1.750.000,00
37.	0206030503	Printer	0002	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
38.	0206030503	Printer	0003	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
39.	0206030503	Printer	0004	CANON		Plastik	2004	1.750.000,00
40.	0206030509	Keyboard	0002	ACER		Plastik	2006	100.000,00
41.	0206030509	Keyboard	0003	ACER		Plastik	2006	100.000,00
42.	0206030509	Keyboard	0004	ACER		Plastik	2006	100.000,00
43.	0206030509	Keyboard	0005	ACER		Plastik	2006	100.000,00
44.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.III	0002	MONACO		Plastik	2008	2.467.500,00
45.	0206040306	Kursi Kerja Pejabat Ess.III	0004	FANTONI		Plastik	2008	2.337.500,00
46.	0206040306	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	FANTONI		Plastik	2007	862.000,00
47.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0007	FANTONI		Plastik	2005	400.000,00
48.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0008	FANTONI		Plastik	2005	400.000,00
49.	0206040605	Kursi Tamu diruangan pejabat Ess.III	0001	-	Kayu		2002	2.600.000,00
Total Asset								145.781.791,00



Data Aset yang telah diserahkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

No	Nomor		Jenis Barang/Na ma Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik. No. Chasis/ Mesin	Jumlah	Ket
	Kode Barang	Registrasi				Harga	
2459	0206040108	0001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			2.518.538,00	
2460	0206040108	0002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			2.518.538.00	
2474	0206040305	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			1.900.000	
2475	0206040305	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			2.750.000	
2759	0206040308	0001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			1.011.461.00	
2760	0206040308	0002	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			1.011.461.00	
2775	0206040308	0007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2776	0206040308	0008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2777	0206040308	0009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2778	0206040308	0010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			948.000.00	
2785	0206040308	0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			937.500.00	
2841	0206040605	0007	Kursi Tamu diruang pejabat eselon III			5.000.000	
2886	0206066904	0002	AC Standing Floor	Panasonic 3 PK		30.060.820.00	
2889	0206066904	0001	AC Standing Floor	3 PK		18.002.577.00	
Total Aset						69.502.895.00	



**Data Inventarisasi Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada Biro
Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 terdiri dari :**

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Merk/Type	Jlh	Harga Satuan	Asal Perolehan
1.	Roda 4	KB. 54	Suzuki Grand Vitara	1	319.100.000	Biro Pengelolaan Aset
2.	Roda 4	KB. 1261 HO	Nissan Grand Livina	1	179.650.000	Biro Pengelolaan Aset
3.	Roda 2	KB. 2372 QU	Yamaha 55S (T135SEC)	1	16.879.000	Biro Pengelolaan Aset
4.	Roda 2	KB. 5524 OU	Yamaha 1LB	1	17.948.012	Biro Pengelolaan Aset

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 024/128/PA-A Tanggal 21 Februari 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206030203	Komputer Portable / Laptop		Lenovo Idea Pad/320-14IKB		Besi/ Plastik	2018	4 Unit 32.083.984
2.	0206030503	Printer		Epson/L360		Plastik	2018	1 Unit 2.433.957

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 024/184/PA-A Tanggal 19 Maret 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0207020603	Proyektor Multimedia		Epson			2018	1 Unit 6.242.197
2.	0207020603	Proyektor Multimedia		Acer			2018	1 Unit 5.561.230
3.	0207010326	Layar Proyektor					2018	2 Unit 1.702.416



**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 024/267.1/PA-A Tanggal 3 Mei 2018**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206020618	UPS		ICA/ CP 1400		Besi	2018	3 Unit 4.224.222
2.	0206030201	Komputer		HP All In One PC 20/ c317d		Plastik	2018	3 Unit 24.062.988
3.	0206010404	<i>Filling Cabinet 2 Laci</i>		Brother		Besi	2018	2 Unit 3.433.610
4.	0206010404	<i>Filling Cabinet 4 Laci</i>		Brother		Besi	2018	2 Unit 5.362.260
5.	0206010401	Lemari Besi		Brother		Besi	2018	1 Unit 2.985.735
6.	0206030201	Desktop Komputer		Acer Vertionj/ M4610		Besi/ Plastik	2009	1 Unit 6.930.000
7.	0206030502	LCD Monitor		Acer/ G195HQV		Besi/ Plastik	2011	1 Unit 2.475.000
8.	0206030203	Komputer Portable/ Laptop		MacBook Pro 8.1		Besi/ Plastik	2011	1 Unit 15.050.978

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 027/2463.1/UMUM/2019 Tanggal 13 Agustus 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206030201	Komputer		Lenovo AIO 520-24ARR 0QID		Plastik	2019	2 Unit
2.	0206030503	Printer		Epson L5190		Plastik	2019	3 Unit
3.	0206030203	Laptop		Lenovo IdeaPad 330 8LID Black		Besi/ Plastik	2019	3 Unit
4.		<i>Scanner</i>		Plustek PS188		Besi	2019	1 Unit
5.	0206020618	UPS		ICA UPS CP 1400VA/700 W		Besi	2019	3 Unit
6.	0206066904	AC 2 PK		Panasonic		Besi/ Plastik	2019	3 Unit



**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 027/2610.1/UMUM/2019 Tanggal 26 Agustus 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.II		MONTANA STAFF DESK 1607 LEFT		Plastik	2019	1 Unit
2.	0206040105	Meja Kerja Pejabat Ess.IV		MALCA STAFF DESK 120 LIGHT MAPLE		Plastik	2019	2 Unit
3.	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		ZUAN STAFF CHAIR BLACK		Plastik	2019	4 Unit

**Data Aset yang telah diserahkan Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalbar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Nomor: 027/0787/UMUM/2019 Tanggal 25 November 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	REGIS TER	MERK TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBE LIAN	HARGA (Rp.)
1.	0206066904	AC 1 PK		Mitsubishi		Besi/ Plastik	2019	1 Unit

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, diupayakan adanya penambahan beberapa sarana/prasarana secara bertahap atau per semester sebagai pengganti terhadap kondisi barang-barang yang sudah tidak layak pakai, sehingga terdapat peningkatan dan dalam kondisi cukup memadai (khusus prasarana maubeler).

b. Barang Habis Pakai

Untuk sarana rutinitas kerja sehari-hari (kebutuhan ATK, Fotocopy, dll) belanja berdasarkan DPA yang telah ditetapkan masing-masing kegiatan berdasarkan pagu yang telah dibagi. Sedangkan untuk kebutuhan akan kertas berlogo Akcaya maupun lambang garuda dan amplop berlogo difasilitasi oleh Biro Umum



Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum, sarana dan prasarana sudah memadai meskipun belum bisa dikatakan lengkap, karena belum didukung dengan *Layout* Tata Ruang Kantor sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan setiap usulan kebutuhan unit kerja Biro Perekonomian sebagian kecil saja yang bisa terpenuhi dan seringkali terkendala dengan Anggaran yang terbatas dari unit kerja yang menangani (khususnya Biro Pengelolaan Aset).

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi disusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai sarana bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Selain itu laporan kinerja tahunan juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Berdasarkan Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembangunan yang mengacu pada sasaran capaian kinerja pada tahun 2019 diharapkan dapat memenuhi sasaran yaitu :



1. Terwujudnya Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pelayanan dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Terwujudnya Perumusan Kebijakan dibidang Sarana Perekonomian Daerah.

Sasaran tersebut dicapai melalui 2 (dua) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan alokasi dananya yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.560.863.000,00, adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 903/2509/BPKPD-B Tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Perubahan APBD Tahun 2019 menjadi Rp.1.822.330.950,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.420.797.361,00 atau sebesar 77,97%.

Untuk pencapaian sasaran tersebut tentunya tidak terlepas dari suasana kerja yang cukup kondusif antara lain adanya kerjasama staf antar bagian yang telah terjalin baik, pengalaman dan kemampuan staf melaksanakan pekerjaan relatif cukup baik, dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai walaupun kondisinya belum dapat dikategorikan baik serta tingkat disiplin pegawai relatif cukup baik.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar yang dapat dilihat dari kelancaran intensitas kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat/pertemuan dan menghadiri undangan rapat serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, yang dilakukan dalam rangka pengembangan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Dalam Bab ini, Rencana strategis yang dikemukakan meliputi visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utama.

1. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan visinya yaitu:

“ Menjadikan Biro Perekonomian Yang Mampu Merumuskan Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perekonomian Daerah ”

Visi tersebut akan menjadi arah perkembangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat kedepan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang akan datang Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat harus mempunyai peran dalam merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan.



2. Misi

Misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengembangan Kebijakan Perekonomian Kalimantan Barat melalui peran dan fungsi strategis Biro Perekonomian;
- b. Menyelaraskan berbagai rencana kegiatan dan keuangan
- c. Meningkatkan profesionalisme Aparatur serta tersedianya sarana dan prasarana kantor;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang memadai.

3. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, maka tujuan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 1) Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Meningkatkan Pengembangan Kebijakan dibidang Sarana Perekonomian Daerah termasuk Ekonomi Kreatif;
 - 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;



- 4) Meningkatkan Penilaian Kinerja Instansi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perekonomian Daerah.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi perekonomian daerah dibidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta energi dan sumber daya mineral yang berkualitas;
- 2) Terselenggaranya Kebijakan dibidang sarana perekonomian daerah termasuk ekonomi kreatif;
- 3) Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
- 4) Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan tugas;
- 5) Terwujudnya penilaian dan penyusunan laporan kinerja instansi, tersusunnya kompetensi setiap jabatan struktural dan non struktural , SOP secara komprehensif dan tersusunnya laporan secara tepat waktu.



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian kerja akan diiktisarkan beberapa hal penting program kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si.**
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A.L. LEYSANDRI, SH**
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,
2019

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian,

A.L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012



Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1.	2. SASARAN STRATEGIS		3. INDIKATOR KINERJA	4. TARGET
1.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam dan Kehutanan		Persentase Meningkatnya PDRB Dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam dan Kehutanan	5,28 %
2.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Dari Sektor Mineral (Pertambangan dan Galian)		Persentase Meningkatnya PDRB Dari Sektor Mineral (Pertambangan dan Galian)	8,46 %
3.	Terpenuhinya Pasokan Listrik di wilayah Kalimantan Barat	3.1.	Persentase Meningkatnya Rasio Kelistrikan Kalimantan Barat	86,47 %
		3.2.	Persentase Meningkatnya Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT)	17 %
4.	Tersediaanya Bahan Bakar Minyak dan Gas Satu Harga di Wilayah Kalimantan Barat	4.	Meningkatnya Ketersediaan Pasokan Bahan Bakar Minyak dan Gas Satu Harga	11 Titik
5.	Tersedianya Daya Dukung Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dalam Pengembangan Perekonomian Daerah	5.	Persentase Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup	75,52 %
6.	Terwujudnya Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan pangan	6.	Persentase Menurunnya Jumlah Penduduk Rawabn Pangan	7,02 %
7.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Investasi Sektor Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD Dalam Rangka Penguatan Struktur Ekonomi Kalimantan Barat.	7.1	Persentase Pertumbuhan Investasi Kalimantan Barat	6,70 %
		7.2	Persentase Meningkatnya Sektor jasa Keuangan	5,65 %



		7.3	Meningkatnya Kinerja BUMD	66 %
8.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Sarana Perekonomian Daerah Dalam Rangka Penguatan Struktur Ekonomi Kalimantan Barat		Persentase Meningkatnya Kinerja Sarana Perekonomian	41 %
9.	Terwujudnya Inflasi Daerah sebesar 3,36 Dengan Deviasi ± 1		Persentase Inflasi Daerah	3,60 %
10.	Terwujudnya Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Daerah	10.1	Persentase Indeks Literasi Keuangan	33,60 %
		10.2	Persentase Indeks Inklusi Keuangan Daerah	72 %
11.	Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat		Persentase Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	45 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Bina Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 756.279.700,00,-	APBD
2.	Program Bina Sarana Perekonomian Daerahna	Rp. 476.651.800,00,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.232931500,00-	

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

A.L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian,

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PEREKONOMIAN

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN

Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2019 merupakan bagian evaluasi tahunan dari Rencana Kerja Tahun 2019 yang ditetapkan Biro Perekonomian pada awal Tahun Anggaran 2019 kegiatan yang diukur sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan melalui 2 (dua) program yaitu **Program Bina Perekonomian Daerah di bidang Sumber daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral** dan **Program Bina Sarana Perekonomian Daerah** yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD Perubahan**) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, yang dilakukan untuk mencapai **2 (dua) Sasaran** yang telah ditetapkan untuk mencapai misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut di atas sebesar **Rp. 2.560.863.000,00** dengan rincian (Kesesuaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2019).

Capaian kinerja Biro Perekonomian dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di awal tahun dengan realisasi yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.

Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	5,28%	%
		Terkendalinya Inflasi Daerah	3,60%	%



Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar yang dapat dilihat dari kelancaran intensitas kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat/ pertemuan dan menghadiri undangan rapat serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi kinerja Biro Perekonomian pada Tahun 2019 sebesar 77,97%. Dari 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan yang mendukung sasaran strategis diatas terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
2. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
3. Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 1. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Program Bina Perekonomian Derah Dibidang Sumber Daya Petanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi	Rp.756.279.700	Rp 568.521.800	75,17%		N/A



		dan Sumber Daya Mineral					
		Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Rp. 476.651.000	Rp.284.942.004	59,78%		

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan antara Persentase Realisasi Anggaran Pertama sebesar 75,17% dan Persentase Realisasi Anggaran Kedua sebesar 59,78% Realisasi Capaian Kinerja Sasaran sebesar % sehingga Tingkat Efisiensi tidak dapat dihitung mengingat besaran Persentase dibawah 100%.

Dengan adanya target dan realisasi kinerja Tahun 2019, Semua Sumber Daya yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, baik itu sumber daya aparatur, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan yang ada belum semuanya maksimal, dari sisi sumber daya aparatur masih terdapat kekurangan sumber daya aparatur yang handal dan maksimal dalam bekerja, ini terlihat adanya beberapa aparatur yang masih merangkap dalam suatu pekerjaan, dikarenakan beban kerja yang ada tidak ditunjang dengan adanya kebutuhan akan jumlah aparatur, selain itu juga sarana dan prasaran yang tersedia saat ini sebagai penunjang kegiatan masih sangat terbatas. Untuk sumber daya keuangan yang telah ditetapkan untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup menunjang.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan dua program yaitu Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumber Daya Pertanian, Kelutan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral dan Program Bina Sarana Perekonomian Daerah terdapat 3 (tiga) kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan yang terdiri dari :



1. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
 2. Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 3. Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat memberikan perbandingannya, dikarenakan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mana sebelumnya adalah Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya Pergub tersebut dipisah menjadi 2 (dua) Biro yaitu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, serta terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dengan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2019
			2017	2018	2019	
1.	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	-			
		Terkendalinya Inflasi Daerah	-			

Pelaksanaan Program/Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari target jangka menengah yang



terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang tertuang dalam RENSTRA Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2018-2023.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Target Nasional
1.	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi		-
		Terkendalinya Inflasi Daerah		-

Realisasi kinerja tahun 2019 sebagian besar sudah sesuai dengan target jangka menengah pada tahun yang sama, namun ada beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian target yang akan dicapai pada tahun tersebut dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti anggaran yang bisa dialokasikan pada kegiatan tersebut maupun keadaan dilapangan.

Untuk Target Nasional di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan di dalam DPA tidak menggunakan Standar Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2019 dapat terlihat penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan sasaran serta alternatif solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut: :

Permasalahan:

- Kurangnya keterlibatan Biro Perekonomian dalam perencanaan Pembangunan Pertanian di Kalimantan Barat. Kemudian, terdapat beberapa Kabupaten/Kota sampai saat masih belum mengirimkan SK Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kebijakan CSR masih belum



memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di kawasan hutan.

Solusi:

- ✓ Perlunya komitmen bersama antara Biro Perekonomian dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah Kalimantan Barat, perlu adanya Mendorong Kabupaten/Kota diminta menghadiri kegiatan dan sosialisasi dan segera membentuk Tim TPID di Kabupaten/Kota masing-masing.perbaikan dan pemetaan berkaitan CSR yang telah diberikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan hutan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2019, Alokasi dana untuk pembiayaan 40 (empat puluh) kegiatan yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.560.863.000,00** dari APBD 2019 dengan (DPPA) Perubahan Anggaran sebesar **Rp. 1.822.330.950,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 1.420.797.361,00** atau **77,97%** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Keuangan Biro Perekonomian
Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN:	Rp.316.071.250,00	Rp. 311.993.507	98,71
1.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 9.000.000	Rp. 8.404.450	93,38
2.	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 4.575.000	Rp. 3.418.400	74,72
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 4.800.000	Rp. 4.700.500	97,93
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 17.000.000	Rp. 15.430.400	90,77



5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100
6.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rp. 235.696.250	Rp. 235.190.407	98,51
7.	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Rp. 30.000.000	Rp. 29.849.350	99,50
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Rp. 58.328.200	Rp. 45.292.600	77,65
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional	Rp. 38.960.000	Rp. 27.699.900	71,07
9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Rp. 7.778.000	Rp. 7.778.000	100
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	Rp. 6.600.000	Rp. 5.998.300	90,88
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Rp. 4.990.200	Rp. 3.816.400	76,48
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 20.000.000	Rp. 19.693.800	98,47
12.	Penyusunan Penetapan Kinerja	Rp. 20.000.000	Rp. 19.693.800	98,47
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Rp.180.000.000	Rp. 178.364.850	99,09
13.	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 35.000.000	Rp. 34.996.650	99,99
14.	Penyusunan LAKIP	Rp. 25.000.000	Rp. 24.383.100	97,53
15.	Penyusunan RENSTRA	Rp. 30.000.000	Rp. 29.875.400	99,58
16.	Penyusunan RENJA SKPD	Rp. 30.000.000	Rp. 29.895.100	99,65
17.	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Rp. 30.000.000	Rp. 29.616.100	98,72
18.	Penyusunan RKA SKPD, dan DPA SKPD	Rp. 30.000.000	Rp. 29.598.500	98,66
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH :	Rp. 15.000.000	Rp. 14.999.800	100
19.	Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset	Rp. 15.000.000	Rp. 14.999.800	100
VI.	PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DIBIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Rp.756.279.700	Rp 568.521.800	75,17
20.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan	Rp. 123.407.500	Rp. 93.647.600	75,88



21.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 44.073.000	Rp. 39.871.600	90,47
22.	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 35.820.000	Rp. 19.470.000	54,36
23.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Rp. 70.453.200	Rp. 63.247.000	89,77
24.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Rp. 46.871.450	Rp. 38.988.000	83,18
25.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Barat	Rp. 27.683.000	Rp. 16.744.000	60,48
26.	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 69.695.000	Rp. 63.082.000	90,51
27.	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Rp. 76.550.000	Rp. 46.180.000	60,33
28.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Rp. 58.380.000	Rp. 47.260.000	80,95
29.	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Rp. 96.267.000	Rp. 61.749.000	64,14
30.	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Rp. 107.079.550	Rp. 78.282.600	79,11
VII.	PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH	Rp. 476.651.000	Rp. 284.942.004	59,78
31.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 19.890.000	Rp. 5.690.000	28,61
32.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Rp. 29.230.000	Rp. 19.448.904	66,54
33.	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 35.300.000	Rp. 32.172.600	91,14
34.	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 59.981.800	Rp. 26.583.600	44,32
35.	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	Rp. 36.833.000	Rp. 21.273.800	57,76
36.	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	Rp. 54.094.000	Rp. 15.154.000	28,01
37.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp. 84.425.000	Rp. 44.300.800	52,47
38.	Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Dan Penanaman Modal	Rp. 42.180.000	Rp. 20.852.900	64,41



39.	Koordinasi Pengembangan BUMD Di Kalimantan Barat	Rp. 58.060.000	Rp. 38.395.400	66,13
40.	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Rp. 66.460.000	Rp. 61.070.000	91,89
JUMLAH		1.822.330.950	1.420.797.361,00	77,97

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat dikategorikan **Baik** dengan capaian kinerja %.

-----o00o-----



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, merupakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai penjabaran dari sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2018 -2023.

Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat selain menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran, juga menampilkan strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Biro. Oleh karena itu Laporan Kinerja Tahunan yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan efek positif dan daya guna bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang sehingga diharapkan dapat mewujudkan “*Good Governance*”

Sesuai Rencana Strategis 2018-2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat dikategorikan **Baik** dengan capaian kinerja %.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2019, Alokasi dana untuk pembiayaan 40 (empat puluh) kegiatan yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.822.330.950,00** dari APBD 2019 (DPA Perubahan) dengan Realisasi sebesar **Rp. 1.420.797.361,00** atau sebesar **77,97%**

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh suasana kerja yang cukup kondusif antara lain dukungan kerjasama staf antar bagian yang telah terjalin baik, pengalaman dan kemampuan staf melaksanakan pekerjaan relatif cukup baik, dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai



walaupun kondisinya belum dapat dikategorikan baik serta tingkat disiplin pegawai relatif cukup baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar yang dapat dilihat dari kelancaran intensitas kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi antar Biro maupun antar unit kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan arahan Gubernur (termasuk penyiapan bahan rapat/pointer dan pidato Gubernur), penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan melaksanakan konsultasi dalam rangka memantapkan kebijakan yang akan dibuat, melaksanakan rapat-rapat/pertemuan dan menghadiri undangan rapat serta melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi bahan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Februari 2020
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Dr. HERKULANA MEKARRYANI.S.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	5,28%		
		Terkendalinya Inflasi Daerah	3,60%		

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 1.822.330.950,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 1.420.797.361,00

Pontianak, Februari 2020
Kepala Biro Perekonomian,

Dr. HERKULANA MEKARRYANI. S, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. HERKULANA MEKARRYANI S.,M, Si**
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A.L. LEYSANDRI, SH**
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Sekretaris Daerah,

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian,

A.L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor investasi dan penanaman modal	79 %
		2. Persentase kinerja lembaga keuangan daerah dan BUMD	79 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan sektor BUMD	83 %
2.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatkan Lingkungan Hidup	1. Persentase terlaksananya kebijakan sektor sumber daya pertanian, sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	75 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor mineral dan energi yang ditindaklanjuti	75 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kelistrikan dan gas yang ditindaklanjuti	75 %
		4. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan yang ditindaklanjuti	75 %
		5. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	77 %
		6. Persentase terlaksananya kebijakan di bidang ketahanan pangan yang ditindaklanjuti	77 %
3.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perdagangan yang ditindaklanjuti	65 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perindustrian yang ditindaklanjuti	50 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor koperasi yang ditindaklanjuti	66 %
		4. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	83 %
		5. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Pariwisata yang ditindaklanjuti	33 %
		6. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perhubungan yang ditindaklanjuti	33 %
		7. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor komunikasi yang ditindaklanjuti	33 %
4.	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksana Berusaha	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Inflasi Daerah	83 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Percepatan akses keuangan daerah	45 %

		3. Persentase dokumen pertimbangan kebijakan penyelesaian persoalan pelaksana berusaha	53 %
--	--	--	------

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Rp 273.722.300	APBD
2.	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	Rp 1.346.041.000	APBD
3.	Program Bina Sarana Perekonomian	Rp 555.970.600	APBD
4.	Program Pengendalian Inflasi Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Rp 365.697.500	APBD
	Total	Rp 2.541.431.400	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Sekretaris Daerah,

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian

A.L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIKE YOLANDA, ST.MT**
Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HERKULANA MEKARRYANI S.,M, Si**
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

Pihak Pertama
**Kepala Bagian Kebijakan
Perekonomian**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina
NIP. 19770804 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksana Berusaha	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Inflasi Daerah	83 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Percepatan akses keuangan daerah	45 %
		3. Persentase dokumen pertimbangan kebijakan penyelesaian persoalan pelaksanaan berusaha	53 %
2.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perdagangan yang ditindaklanjuti	65 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perindustrian yang ditindaklanjuti	50 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor koperasi yang ditindaklanjuti	66 %
		4. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	83 %
		5. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Pariwisata yang ditindaklanjuti	33 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Rp 76.974.300	APBD
2.	Program Bina Sarana Perekonomian	Rp 401.711.900	APBD
3.	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Rp 365.697.500	APBD
	Total	Rp. 844.383.700	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian

Pihak Pertama
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Dr. HERKULANA MEKARRYANI.S, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660309 198603 2 012

WIKE YOLANDA, ST, MT

Pembina
 NIP. 19770804 200212 2 006



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN**

Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HERKULANA MEKARRYANI S.,M, Si**

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

**Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian**

**Pihak Pertama
Kepala Bagian Sumber Daya Alam**

**Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012**

**Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19631102 199403 1 007**

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	1. Persentase terlaksananya kebijakan sektor sumber daya pertanian, sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	75 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor mineral dan energi yang ditindaklanjuti	75 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kelistrikan dan gas yang ditindaklanjuti	75 %
		4. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan yang ditindaklanjuti	75 %
		5. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	77 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	Rp 1.346.041.000	APBD

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian

Pihak Pertama
Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Dr. HERKULANA MEKARRYANI.S, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660309 198603 2 012

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN

Pembina Tingkat I
 NIP. 19631102 199403 1 007



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BIRAY, SE**

Jabatan : Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

**Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian**

**Pihak Pertama
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah**

Dr. HERKULANA MEKARRYANI S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

BIRAY, SE
Pembina
NIP. 19630505 199101 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor investasi dan penanaman modal	79 %
		2. Persentase kinerja lembaga keuangan daerah dan BUMD	79 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan sektor BUMD	83 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Rp 196.748.000	APBD
2.	Program Bina Sarana Perekonomian	Rp 154.258.700	APBD
	Total	Rp. 351.006.700	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Biro Perekonomian

Pihak Pertama
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah

Dr. HERKULANA MEKARRYANI.S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012

BIRAY, SE
Pembina
NIP. 19630505 199101 1 002



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIA YOSEPHINA, SE.ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKE YOLANDA, ST.MT**
Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

**Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian**

**Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian
Analisis Ekonomi Makro**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

MARIA YOSEPHINA, SE, ME
Penata
NIP. 19830514 201101 2 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor investasi dan penanaman modal	79 %
2.	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksana Berusaha	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Inflasi Daerah	83 %
		2. Persentase dokumen pertimbangan kebijakan penyelesaian persoalan pelaksanaan berusaha	53 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Rp 76.974.300	APBD
2.	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Rp 73.917.600	APBD
3.	Monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Barat	Rp 69.297.400	APBD
4.	Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Rp 99.880.400	APBD
5.	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	Rp 48.774.000	APBD
	Total	Rp 368.843.700	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
**Kepala Bagian Kebijakan
Perekonomian**

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian
Analisis Ekonomi Makro**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

MARIA YOSEPHINA, SE, ME
Penata
NIP. 19830514 201101 2 004



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNI, SE.ME**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKE YOLANDA, ST.MT**

Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

**Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian**

**Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian
Analisis Ekonomi Mikro**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

ERNI, SE, ME
Penata
NIP. 19760816 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksana Berusaha	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Percepatan akses keuangan daerah	45 %
2.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perdagangan yang ditindaklanjuti	66%
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor koperasi yang ditindaklanjuti	66 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	83 %
		4. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor Pariwisata yang ditindaklanjuti	33 %
		5. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor perindustrian yang ditindaklanjuti	66 %
		6. Persentase terlaksananya kebijakan perhubungan yang ditindaklanjuti	33 %
		7. Persentase terlaksananya kebijakan sektor komunikasi yang ditindaklanjuti	33 %
		8. Persentase terlaksananya kebijakan sektor infrastruktur dasar dan infrastruktur fisik yang ditindaklanjuti	45 %

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sinkronisasi percepatan pembangunan di bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum)	Rp 74.616.400	APBD
2.	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat)	Rp 79.514.000	APBD
3.	Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Barat	Rp 98.770.900	APBD
4.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Rp 74.893.000	APBD

5.	Percepatan pembangunan pasar rakyat lintas kabupaten di Kalimantan Barat	Rp 49.560.200	APBD
6.	Percepatan akses keuangan daerah di Kalimantan Barat	Rp 98.185.500	APBD
	Total	Rp 475.540.000	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
**Kepala Bagian Kebijakan
Perekonomian**

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian
Analisis Ekonomi Mikro**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

ERNI, SE, ME
Penata
NIP. 19760816 201101 2 001



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVI DARFIANTI**
Jabatan : Kepala Sub Tata Usaha Biro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKE YOLANDA, ST.MT**
Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

**Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian**

**Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Biro**

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

EVI DARFIANTI
Penata Tk.I
NIP. 19700224 198908 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Yang Berkualitas dan Berlandaskan Prinsip <i>Good Governance</i>	Meningkatnya kelancaran Tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	100 %
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana di lingkungan Biro Perekonomian dengan optimal	100 %
		Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur dilingkungan Biro Perekonomian	100%
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	100 %
		Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp . 10.000.000	APBD
2.	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 5.000.000	APBD
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 4.800.000	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.000.000	APBD
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 30.000.000	APBD
6.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp. 488.880.000	APBD
7.	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Rp. 30.000.000	APBD
8.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 42.000.000	APBD
9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Rp. 10.000.000	APBD
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Rp. 10.000.000	APBD
11.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Rp. 27.372.400	APBD
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Rp. 6.000.000	APBD
13.	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Rp. 15.000.000	APBD
14.	Penyusunan Penetapan Kinerja	Rp. 18.205.500	APBD
15.	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 34.988.400	APBD
16.	Penyusunan LAKIP	Rp. 25.000.000	APBD
17.	Penyusunan RENJA SKPD	Rp. 27.857.500	APBD
18.	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Rp. 28.005.800	APBD
19.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 25.368.300	APBD
20.	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Rp. 28.463.800	APBD

21.	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Rp.	18.737.000	APBD
22.	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Rp.	14.057.100	APBD
	Total	Rp.	914.735.800	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
**Kepala Bagian Kebijakan
Perekonomian**

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

WIKE YOLANDA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

EVI DARFIANTI, A.Md
Penata Tingkat I
NIP. 19700224 198908 2 001



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IR. AKHMAD HARRIS SANTOSO**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN**
Jabatan : **Kepala Bagian Sumber Daya Alam**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian Sumber Daya
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan**

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

Ir. AKHMAD HARRIS SANTOSO
Pembina
NIP. 19630212 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	1. Persentase terlaksananya kebijakan sektor sumber daya pertanian, sumber daya alam, yang ditindaklanjuti	75 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan yang ditindaklanjuti	75 %
		3. Persentase terlaksananya kebijakan di bidang ketahanan pangan yang ditindaklanjuti	77 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura di Kalimantan Barat	Rp 34.709.800	APBD
2.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perkebunan di Kalimantan Barat	Rp 64.383.900	APBD
3.	Monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Barat	Rp 58.984.000	APBD
4.	Monitoring dan evaluasi kebijakan dan program perkebunan di Kalimantan Barat	Rp 49.884.700	APBD
5.	Sinkronisasi percepatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat	Rp 65.418.600	APBD
6.	Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat	Rp 49.927.600	APBD
7.	Sinkronisasi program ketahanan pangan di Kalimantan Barat menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan	Rp 74.148.900	APBD
8.	Penyusunan Bahan Kebijakan di Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Rp 66.165.900	APBD
9.	Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang peternakan di Kalimantan Barat	Rp 48.492.300	APBD
10.	Penyusunan Bahan kebijakan bidang kehutanan di Kalimantan Barat	Rp 64.935.900	APBD
11.	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Rp 59.709.200	APBD
12.	Monitoring dan evaluasi kebijakan kehutanan di Kalimantan Barat	Rp 84.153.200	APBD
13.	Monitoring dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Barat	Rp 49.990.500	APBD
	Total	Rp 770.904.500	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian Sumber Daya
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan**

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19631102 199403 1 007

Ir. AKHMAD HARIS SANTOSO
Pembina
NIP. 19630212 199203 1 007



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUKARIA**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN**
Jabatan : **Kepala Bagian Sumber Daya Alam**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian Sumber Daya
Energi dan Air**

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

Ir. SUKARIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19640725 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor mineral dan energi yang ditindaklanjuti	75 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor kelistrikan dan gas yang ditindaklanjuti	75 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sumber daya mineral dan air tanah di Kalimantan Barat	Rp 71.422.000	APBD
2.	Sinergitas Percepatan pembangunan energi dan kelistrikan di Kalimantan Barat	Rp 81.539.800	APBD
3.	Evaluasi pelaksanaan pembangunan kelistrikan dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas di Kalimantan Barat	Rp 78.983.400	APBD
4.	Monitoring dan evaluasi kebijakan energi dan kelistrikan di Kalimantan Barat	Rp 63.809.800	APBD
	Total	Rp 295.755.000	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19631102 199403 1 007

Ir. SUKARIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19640725 199203 1 008



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNARDI, SP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN**
Jabatan : **Kepala Bagian Sumber Daya Alam**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Pihak Pertama
**Kepala Sub Bagian Pertambangan
dan Lingkungan Hidup**

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19770804 200212 2 006

SUNARDI, SP, M.Si
Penata
NIP. 19691030 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	1. Persentase terlaksananya kebijakan di sektor lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	77 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan sektor mineral dan energi yang ditindaklanjuti	75 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan pengawasan kebijakan bidang pertambangan di Kalimantan Barat	Rp 70.336.400	APBD
2.	Sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dalam rangka peningkatan ILKH di Kalimantan Barat	Rp 79.327.700	APBD
3.	Monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan hidup di Kalimantan Barat	Rp 59.084.000	APBD
4.	Sinergitas percepatan pembangunan dan pengelolaan Sumber daya mineral dan air tanah di Kalimantan Barat	Rp 70.633.400	APBD
	Total	Rp 279.381.500	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Ir. ABANG MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19631102 199403 1 007

SUNARDI, SP, M.Si
Penata
NIP. 19691030 199303 1 004



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTINUS HARTONO, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BIRAY, SE**
Jabatan : **Kepala Bagian Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik
Daerah Jasa Keuangan dan Aneka
Usaha

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

AGUSTINUS HARTONO, SE
Penata
NIP. 19770828 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Persentase kinerja lembaga keuangan daerah dan BUMD	79 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan sektor BUMD	83 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat	Rp 89.166.800	APBD
2.	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Rp 62.581.200	APBD
3.	Penyusunan PERDA tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	Rp 45.000.000	APBD
	Total	Rp 196.748.000	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik
Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

AGUSTINUS HARTONO, SE
Penata
NIP. 19770828 199803 1 001



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANSIT, SPd**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BIRAY, SE**
Jabatan : **Kepala Bagian Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik
Daerah Air Minum, Limbah dan
Sanitasi

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

ANSIT, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19700726 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1. Persentase kinerja lembaga keuangan daerah dan BUMD	79 %
		2. Persentase terlaksananya kebijakan sektor BUMD	83 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (PDAM) se-Kalbar	Rp 23.576.500	APBD
2.	Monitoring dan Evaluasi kebijakan bidang Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp 49.726.500	APBD
	Total	Rp 73.303.0000	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik
Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

ANSIT, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19700726 199203 1 003



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BEN HARRIGAN MANDEI, S.STP**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BIRAY, SE**
Jabatan : **Kepala Bagian Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Layanan
Umum Daerah

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

BEN HARRIGAN MANDEI, S.STP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19911204 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	1.2 Persentase kinerja lembaga keuangan daerah dan BUMD	79 %
		1.3 Persentase terlaksananya kebijakan sektor BUMD	83 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rapat koordinasi Badan Layanan Usaha Daerah se-Kalimantan Barat	Rp 24.076.500	APBD
2.	Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Badan Layanan Usaha Daerah	Rp 54.026.500	APBD
	Total	Rp 78.103.000	

Pontianak, Februari 2020

Pihak kedua
Kepala Bagian
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Badan Layanan
Umum Daerah

BIRAY, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630505 199101 1 002

BEN HARRIGAN MANDEI, S.STP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19911204 201206 1 001

